BPBD DIY Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan di Pengungsian Warga Merapi

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/hp

Relawan mengikuti rapid test di posko pengungsian Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta.

YOGYAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan penerapan protokol kesehatan untuk warga lereng Gunung Merapi yang tengah mengungsi di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman.

"Yang jelas sesuai prosedur mulai dari memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak itu terus kami tekankan," kata Koordinator Bidang Operasi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DIY Endro Sambodo saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (9/11).

Menurut Endro, sesuai dengan prosedur standar operasi (SOP) di pengungsian telah diberlakukan sejumlah prosedur pencegahan COVID-19, mulai dari prosedur untuk para petugas, protokol untuk para pengungsi, distribusi logistik, relawan, serta kedatangan orang di pengungsian. "Kami juga mengatur prosedur jika ada temuan kasus COVID-19 di pengungsian, serta data dan informasi," kata dia.

Para relawan yang bertugas di posko pengungsian juga diminta mengikuti rapid test untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan barak pengungsian. Selain itu, untuk menjaga jarak fisik antarpengungsi, menurut Endro, BPBD DIY juga telah mengatur tempat pengungsian menjadi bilik-bilik bersekat. Masing-masing bilik diperuntukkan untuk satu KK dengan ukuran ukuran 2x3x2. "Satu bilik diisi satu KK yang rata-rata terdiri empat orang. Sudah cukup lega, dan privasinya juga terjaga," kata dia.

Endro menyebutkan saat ini barak pengungsian yang ada di Balai Desa Glagaharjo, Cangkringan memiliki kapasitas normal 300 orang. Barak pengungsian itu telah diisi 146 orang kelompok rentan yang seluruhnya merupakan warga Dusun Kalitengah Lor, Cangkringan, Sleman. Mereka terdiri atas balita, ibu hamil, lansia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan disabilitas. "Sebelumnya 129 orang, namun sudah bertambah menjadi 146. Seluruhnya merupakan kelompok rentan," kata dia.

Menurut Endro, evakuasi terhadap warga di kawasan rawan bencana (KRB) III atau lima kilometer dari puncak Gunung Merapi dilakukan secara menyeluruh apabila status telah kembali meningkat menjadi awas. **(ANTARA)**

Menkeu: Realisasi Anggaran Program PEN Sudah Semakin Baik

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp 376,17 triliun atau 54,1 persen dari total pagu sebesar Rp 695,2 triliun per 4 November 2020.

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj

Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Sudah semakin membaik karena semua kementerian lembaga terus akan dimonitor," kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (9/11).

Sri Mulyani merinci untuk anggaran bidang kesehatan telah terealisasi Rp 32,15 triliun atau 33,1 persen dari pagu Rp 97,26 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat dan daerah Rp 3,67 triliun serta santunan kematian nakes Rp 0,029 triliun.

Kemudian untuk gugus tugas COVID-19 Rp 3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp 19,85 triliun, bantuan iuran JKN Rp 1,92 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 3,45 triliun.

Bidang perlindungan sosial terealisasi Rp 177,05 triliun atau 75,6 persen dari pagu Rp 234,33 triliun meliputi PKH Rp 36,71 triliun, Kartu Sembako Rp 37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 5,47 triliun, dan bantuan sembako non-Jabodetabek Rp 29,47 triliun.

Kemudian Kartu Pra Kerja Rp 19,87 triliun, diskon listrik Rp 6,97 triliun, BLT dana desa Rp 18,14 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp 4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp 3,29 triliun, dan subsidi gaji Rp 14,88 triliun.

Bidang sektoral dan pemda terealisasi Rp 32,21 triliun atau 48,8 persen dari pagu Rp 65,97 triliun meliputi padat karya Rp 15,44 triliun, insentif perumahan Rp 0,07 triliun, dan DID pemulihan ekonomi Rp 4,73 triliun.

Kemudian DAK Fisik Rp 7,29 triliun, pinjaman daerah Rp 0,979 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp 1,13 triliun, peta peluang investasi Rp 0,002 triliun, serta komunikasi PEN Rp 0,003 triliun.

Dukungan UMKM terealisasi Rp 94,64 triliun atau 82,4 persen dari pagu Rp 114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp 64,5 triliun, dan pembiayaan investasi LPDB Rp 1 triliun. Kemudian untuk PPh Final UMKM DTP Rp 0,55 triliun, subsidi bunga Rp 4,9 triliun, penjaminan kredit Rp 1,57 triliun, dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp 22,11 triliun.

Insentif dunia usaha terealisasi Rp 38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp 120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp 2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp 9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp 13,73 triliun.

Kemudian mengenai pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp 3,57 triliun serta penurunan tarif PPh Badan Rp 9,21 triliun. Pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp 2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp 62,22 triliun dengan penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp 945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp 2 triliun. **(ANTARA)**

Satgas COVID-19 Sebut Masyarakat Semakin Patuh Lakukan 3M

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melihat masyarakat saat ini sudah mulai terbiasa melakukan kebiasaan baru yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah COVID-19.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan dari pantauan aktual di 4,5 juta titik lokasi dalam sebulan terakhir, pihaknya melihat kepatuhan akan mencuci tangan, menjaga jarak serta memakai masker (3M) semakin baik di masyarakat.

"Dari laporan ini kami lihat bahwa kepatuhan individu dan institusi yang kami nilai, ternyata kepatuhan individunya menggunakan masker, contohnya, relatif mereka sudah menggunakan masker. Ada sekitar 20 persen yang belum tertib menggunakan masker," kata Wiku dalam diskusi Satgas Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (9/11).

Angka serupa juga ditemukan dalam penerapan protokol kesehatan menjaga jarak dan mencuci tangan, berdasarkan laporan yang didapat berkat koordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP dan Duta Perubahan Perilaku di seluruh Indonesia.

Menurut Wiku, tren serupa juga terlihat dalam kepatuhan institusi untuk mematuhi protokol kesehatan, meski penerapannya belum sempurna. **(ANTARA)**

Banyumas Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka menyusul temuan kasus penularan COVID-19 di lingkungan sekolah.

"SMP Negeri 6 Purwokerto ditutup dan akan dievaluasi selama 14 hari ke depan karena ada satu guru yang positif. Hari ini ada pemberitahuan, besok sudah mulai tutup," kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (9/11).

Ia mengatakan bahwa SD Negeri Panembangan di Kecamatan Cilongok yang telah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka diperbolehkan melanjutkan aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Sekolah lain yang sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, ia melanjutkan, dapat mengajukan permohonan izin melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah. "Jika sekolah berencana menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, para guru wajib menjalani swab (tes spesimen usap) lebih dulu," katanya.

Selain mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Bupati mengatakan, pemerintah daerah memperketat pengawasan kegiatan masyarakat di sektor yang lain serta menunda pelaksanaan rencana pembukaan kembali bioskop.

"Kami akan memperketat kembali sejumlah aktivitas mengingat angka reproduksi efektif di Banyumas sekarang kembali berada di atas 1, sedangkan positivity rate naik menjadi 4 persen," kata Bupati mengenai indikator penularan COVID-19 di wilayahnya.

Ia mengatakan, Pasar Minggon di kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Satria, Purwokerto, yang telah dibuka kembali akan ditutup lagi untuk keperluan evaluasi karena masih banyak pedagang yang tidak memakai masker dan menaati protokol kesehatan. "Minggu depan mungkin belum akan ditutup, kami beri kesempatan melalui pemberitahuan dulu. Mungkin dua minggu lagi baru akan ditutup," katanya.

Selama kegiatan Pasar Minggon ditutup sementara, dia mengatakan, fasilitas GOR Satria tetap dibuka untuk umum namun dibatasi hanya sampai pukul 10.00 WIB.

Pembatasan waktu aktivitas warga di tempat umum yang sempat diperlonggar juga akan diperketat lagi. Bupati mengatakan bahwa pemberlakuan jam malam yang semula sudah dilonggarkan menjadi pukul 22.00 WIB hingga 06.00 WIB akan kembali diperketat menjadi pukul 20.00 WIB hingga 06.00 WIB. "Bioskop yang rencananya akan kembali dibuka dalam minggu ini, kami tunda hingga sampai waktu yang belum dipastikan," katanya.

Bupati mengimbau masyarakat Kabupaten Banyumas tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Menurut data Pemerintah Kabupaten Banyumas per tanggal 9 November 2020 pukul 14.46 WIB, warga Kabupaten Banyumas yang dikonfirmasi positif COVID-19 sejak awal pandemi sampai sekarang mencapai 871 orang dengan perincian 667 orang sudah sembuh, 27 orang meninggal dunia, dan 177 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan karantina.

Pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit tercatat sebanyak 103 orang, pasien yang menjalani karantina di fasilitas isolasi khusus tujuh orang, dan pasien yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 74 orang. **(ANTARA)**

Disdikpora DIY Belum Berencana Membuka Pembelajaran Tatap Muka SMA/SMK

YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta hingga kini belum memiliki rencana memberlakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di SMA/SMK/SLB untuk mencegah penularan COVID-19.

"Kalau tatap muka seperti dulu sampai sekarang masih belum," kata Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya di Yogyakarta, Senin (9/11).

Menurut Didik, pertimbangan utama belum memberlakukan pembelajaran tatap muka karena hingga kini DIY belum berstatus zona hijau atau kuning. Sesuai dengan RKB empat menteri, bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

ANTARA FOTO/Maulana Surya/ama

Guru membuat tugas dan berinteraksi dengan siswa lewat Google Classroom.

"Kami juga menunggu keputusan baru empat menteri itu, kira-kira ada perubahan atau tidak. Kalau di daerah oranye sudah boleh (tatap muka) atau belum," kata dia.

Meski demikian, khusus di SMK kegiatan praktik telah diperbolehkan dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan di SMA, siswa juga diperbolehkan menemui guru sekadar untuk konsultasi apabila menemui kesulitan dalam pembelajaran daring.

Kegiatan praktik yang diperbolehkan secara terbatas itu, menurut Didik, akan menjadi bahan evaluasi sebagai pertimbangan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka seperti semula. Evaluasi pembelajaran akan terus dilakukan hingga akhir semester. "Kita lihat dulu yang praktik itu perkembangannya seperti apa. Tapi kalau di praktik yang terbatas itu saja muncul klaster baru, tentu akan menjadi pertimbangan kita," kata dia. **(ANTARA)**